

TESIS

**KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-
XXI/2023)**



Disusun Oleh :

AINUN FITRI SYAH, S.H.

NIM : 12122040

**PROGRAM STUDI MAGISER ILMUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA**

2025

TESIS

**KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-
XXI/2023)**



**Disusun Oleh :
AINUN FITRI SYAH, S.H.
NIM : 12122040**

**PROGRAM STUDI MAGISER ILMUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
2025**

TESIS

**KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-
XXI/2023)**

Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

AINUN FITRI SYAH, S.H.

NIM : 12122040

PROGRAM STUDI MAGISER ILMUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

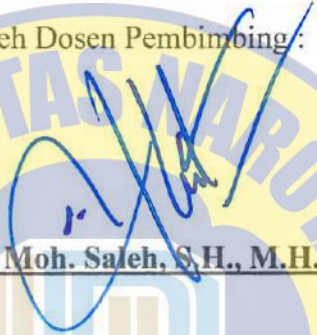
2025

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

Pada Tanggal 30 Janurai 2025

Oleh Dosen Pembimbing:



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



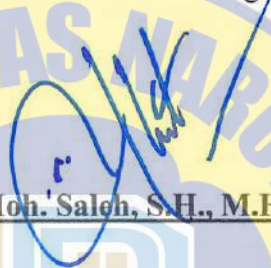
Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah direvisi

Pada Tanggal 7 Februari 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

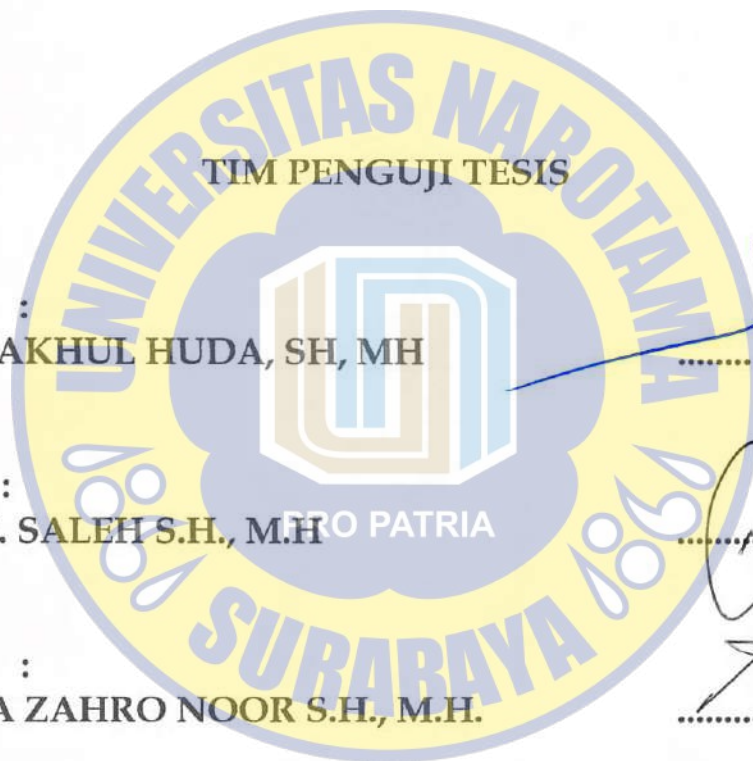
TESIS

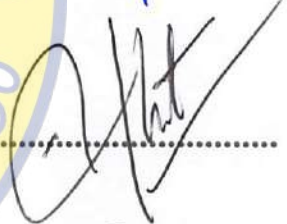
PADA TANGGAL : 30 Januari 2025

Ketua :
Dr. MIFTAKHUL HUDA, SH, MH

Anggota :
Dr. MOH. SALEH S.H., M.H

Anggota :
Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.




.....

.....

.....

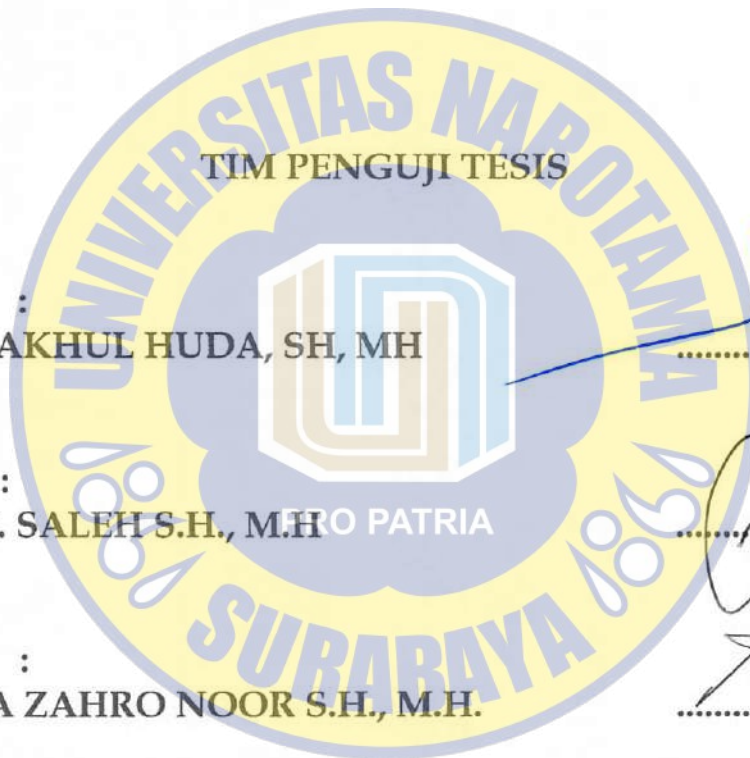
TESIS

PADA TANGGAL : 30 Januari 2025

Ketua :
Dr. MIFTAKHUL HUDA, SH, MH

Anggota :
Dr. MOH. SALEH S.H., M.H. ZAHRO PATRIA

Anggota :
Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.



[Handwritten signatures of the three members of the Tesis Review Team, each followed by a dotted line for a signature mark.]

Lembar Pengesahan

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2024

Telah dilaksanakan seminar proposal Tesis

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum

Nama : Ainun Fitri Syah, S.H.

NIM : 12122040

PROPOSAL PENELITIAN TESIS TELAH DIUJI DAN DISETUJUI

OLEH :

Pembimbing :

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Narotama

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 12122040

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. **KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)**

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

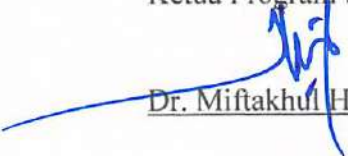
1. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

2. _____

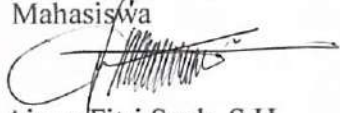
3. _____

4. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Surabaya, 15 Agustus 2024
Mahasiswa


Ainun Fitri Syah, S.H.

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MH



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Jabatan Fungsional :

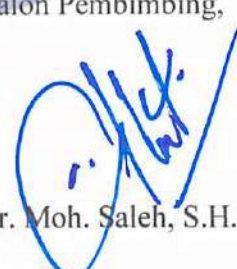
Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 12122040

Judul : KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)

Surabaya, 19 Oktober 2024
Calon Pembimbing,


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya, Telp.(031)-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 12122040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- II. Judul Tesis: KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)
- III. Nama Pembimbing: Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Disetujui oleh Dewan Tesis,
Di Surabaya Pada Tanggal 19 Oktober 2024

Ketua

IV. Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN No.627/NR-FH/ 03/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Moh. Saleh, SH, MH.	12122040	AINUN FITRI SYAH	Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 September 2024
Dekan,

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk : 12122040

Alamat : Jl. R Abdurrahman No. 42 Olean Situbondo

Telp/HP : 082132510668

Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Judul Tesis : KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)

Tgl Dimulai : 1 Oktober 2024

Surabaya, 1 Oktober 2024
Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Ainun Fitri Syah, S.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Bimbingan Pengajuan Judul	1/10/2024	
2.	ACC Judul Tesis	20/10/2024	
3.	Revisi Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka dan Pendekatan	24/10/2024	
4.	Bimbingan Tinjauan Pustaka	26/10/2024	
5.	Proposal Tesis di ACC untuk diseminarkan	28/10/2024	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

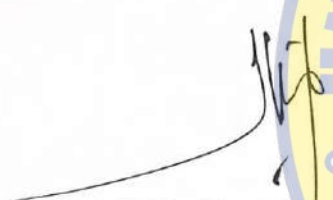
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : AINUN FITRI SYAH
2. NIM : 12122040
- Judul Skripsi /Tesis : Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 21 Oktober 2024

Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,


Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 12122040

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
(STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)**

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 28 Oktober 2024
Kaprodi,


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : Ainun Fitri Syah, S.H.

NIM : 12122040

Tanggal Penilaian : 14 November 2024

Judul Tesis : KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)

Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.	

Surabaya, 14 November 2024
Pembimbing,

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk : 12122040

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING
1.	Linda	Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Saham dengan Karakteristik Perseroan Tertutup	31/10/2024	
2.	Elvia R	Prinsip Demokrasi Dalam Pengisian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	31/10/2024	
3.	Arif Sandjaja	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Bidang Perdagangan Alat Kesehatan Secara Elektronik di Marketplace	31/10/2024	
4.	<u>Ainun Fitri</u> <u>Syah</u>	Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Studi Putusan Mk No 54/Puu-Xxi/2023)	31/10/2024	



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

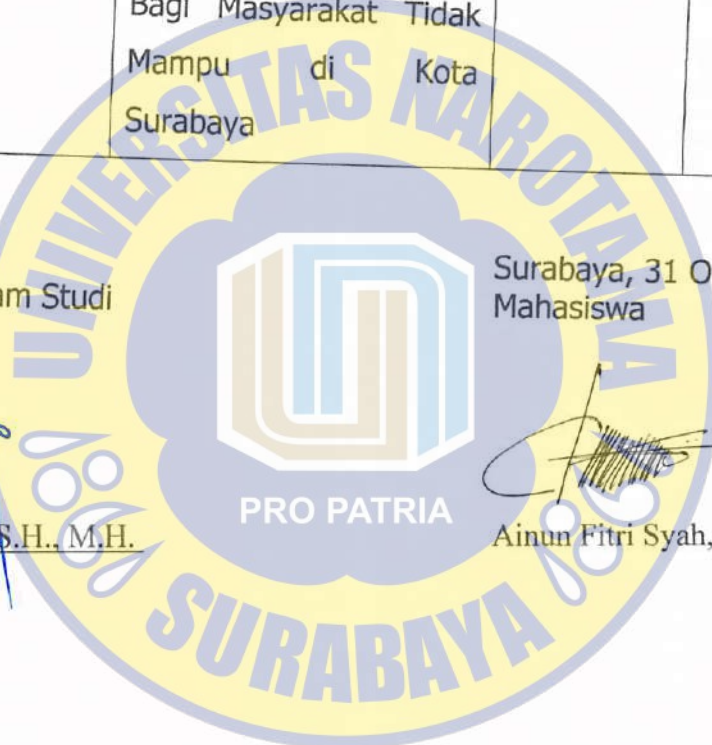
5.	Dedi Purwito	Kebijakan Hukum Atas Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Untuk Memenuhi Hak Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Surabaya	31/10/2024	
----	--------------	--	------------	---

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 31 Oktober 2024
Mahasiswa


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.


Ainun Fitri Syah, S.H.





UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk : 12122040

Alamat : JL. R Abdurrahman No. 42 Olean Situbondo

Telp/HP : 082132510668

Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Judul Tesis : KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)

Tgl Dimulai : 3 Desember 2024

Surabaya, 3 Desember 2024

Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Ainun Fitri Syah, S.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Bimbingan BAB 2 Pembahasan Rumusan Masalah Pertama	3/12/2024	
2.	Revisi BAB 2	4/12/2024	
3.	Acc BAB 2	6/12/2024	
4.	Bimbingan BAB 3 Pembahasan Rumusan Masalah Kedua	8/12/2024	
5.	Revisi BAB 3 Penambahan Sub Bab Pembahasan	10/12/2024	
6.	Revisi BAB 3 Penambahan Sub Bab Pembahasan Harus Minimal 3 Sub Pembahasan	20/12/2024	
7.	Revisi Kata-Kata yang Typo	27/12/2024	
8.	Revisi Analisis Sub Pembahasan kedua Rumusan Masalah Pertama	01/12/2024	
9.	ACC BAB 3	7/01/2025	
10.	Bimbingan BAB 4 Kesimpulan dan Saran	9/01/2025	



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

11.	Revisi Kesimpulan	10/01/2025	
12.	ACC BAB 4 Kesimpulan dan Saran	22/01/2025	

Syarat :

1. Pengajuan seminar Proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan





UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

5SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : AINUN FITRI SYAH
2. NIM : 12122040
3. Judul Skripsi /Tesis : Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 13 Januari 2025

Mengetahui

PRO PATRIA


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A, S.H., M.H.
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Rusthanto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : Ainun Fitri Syah, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 1212 2040

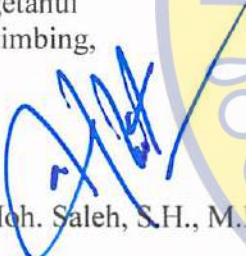
Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan **UJIAN TESIS** pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 23 Januari 2025
Mahasiswa


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.


Ainun Fitri Syah, S.H.

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
3. Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : Ainun Fitri Syah, S.H.

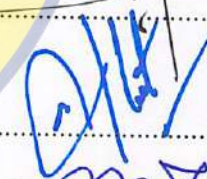
NIM : 12122040

Tanggal Penilaian : 11 Februari 2025

Judul Tesis : KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)

Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Erma Zahro N. S.H., M.H.	

Surabaya, 11 Februari 2025
Pembimbing,

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 27 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



AINUN FITRI SYAH, S.H.

NIM. 12122040

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga tesis dengan judul “KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU-XXI/2023)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa dalam proses penyusunan tesis ini.

1. Assoc. Prof. Dr. Arasy Alimudin, SE., MM., Rektor Universitas Narotama, atas segala arahan, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya selama menjalani studi.
2. Dr. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST., M.HP., Pembina Yayasan Pawiyatan Gita Patria, atas dedikasi, ilmu, dan semangat yang diberikan sehingga saya dapat memperluas wawasan selama proses penelitian ini.
3. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Rektor 1 Universitas Narotama sekaligus penguji, atas kritik membangun, saran, dan waktu yang diberikan dalam pembimbingan akademik serta dalam proses ujian tesis ini.
4. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama sekaligus dosen pembimbing, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang berharga selama saya menyusun tesis ini.
5. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama sekaligus penguji, yang telah memberikan banyak masukan akademis yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Narotama, atas bantuan administratif, dukungan, dan pelayanan yang sangat membantu saya selama proses studi hingga penyelesaian tesis ini.

7. Keluarga saya untuk oarng tuaku ibu dan bapak atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Kehadiran dan dukungan kalian adalah sumber kekuatan saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Narotama, atas kebersamaan, diskusi, dan dukungan yang memberikan warna dalam perjalanan akademik saya.



RINGKASAN

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU- XXI/2023)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan konstitusi dan regulasi sebagai dasar tertib hukum untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembentukan regulasi harus mematuhi asas-asas hukum, memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks Perppu, presiden memiliki kewenangan terbatas untuk menerbitkannya dengan alasan kegentingan yang memaksa, tetapi tetap memerlukan persetujuan DPR sebagai bentuk checks and balances. Kasus Perppu Cipta Kerja menimbulkan kontroversi, terutama terkait alasan penerbitannya yang dianggap tidak memenuhi kriteria kegentingan. Putusan MK 54/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Perppu ini konstitusional tetap mengundang pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi ini dalam kerangka demokrasi konstitusional, memastikan prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji teori demokrasi konstitusional yang menegaskan bahwa setiap regulasi harus sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusi. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks kegentingan yang memaksa, presiden berwenang menerbitkan Perppu sebagai langkah darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Penelitian ini menganalisis

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, sesuai dengan Putusan MK 54/PUU-XXI/2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum serta konsep-konsep yang relevan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum pembentukan Perppu sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Perppu ini konstitusional, termasuk aspek formil dan materiil yang diuji dalam putusan tersebut. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami teori demokrasi konstitusional, prinsip checks and balances, serta konsep kepentingan yang memaksa sebagai landasan penerbitan Perppu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konstitusionalitas pembentukan Perppu Cipta Kerja secara komprehensif, termasuk implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia dan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari demokrasi konstitusional.

Rekomendasi penelitian ini yaitu pemerintah dan DPR diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan instrumen Perppu, dengan memastikan bahwa seluruh elemen kepentingan yang memaksa dapat diukur secara obyektif, didukung bukti konkret, serta dikomunikasikan dengan transparan kepada masyarakat. Juga perlu adanya perbaikan mekanisme legislasi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, sehingga proses pengambilan keputusan mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih inklusif.

SUMMARY

CONSTITUTIONALITY OF THE FORMATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2022 ON JOB CREATION (STUDY OF MK DECISION NO. 54/PUU-XXI/2023)

This research is motivated by the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation which was later ratified as Law Number 6 of 2023. As a country of law, Indonesia makes the constitution and regulations the basis for legal order to create a prosperous society. The formation of regulations must comply with legal principles, have philosophical, juridical, and sociological foundations, and guarantee legal certainty, justice, and benefits. In the context of the Perppu, the president has limited authority to issue it on the grounds of compelling urgency, but still requires the approval of the DPR as a form of checks and balances. The case of the Job Creation Perppu has caused controversy, especially regarding the reasons for its issuance which are considered not to meet the criteria of urgency. The Constitutional Court Decision 54/PUU-XXI/2023 which stated that this Perppu is constitutional still invites pros and cons. This study aims to analyze this regulation within the framework of constitutional democracy, ensuring that the principle of people's sovereignty is maintained in the formation of law in Indonesia.

This study examines the theory of constitutional democracy which emphasizes that every regulation must be in accordance with the principles of people's sovereignty and the constitution. The concept of forming laws and regulations is based on the principles of legal certainty, justice, and benefit, as regulated in Law Number 12 of 2011. In the context of compelling urgency, the president has the authority to issue a Perppu as an emergency measure, as regulated in Article 22 of the 1945 Constitution. This study analyzes Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation in relation to these principles, in accordance with the Constitutional Court Decision 54/PUU-XXI/2023.

The research method used is a juridical-normative approach with a focus on the legislative, case, and conceptual approaches. This study aims to analyze and understand legal regulations and concepts relevant to the formation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The legislative approach is used to examine the legal basis for the formation of the Perppu in accordance with Article 22 of the 1945 Constitution and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The case approach is carried out by analyzing the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 54/PUU-XXI/2023 which states that this Perppu is constitutional, including the formal and material aspects tested in the decision. The conceptual approach is applied to understand the theory of constitutional democracy, the principle of checks and balances, and the concept of compelling urgency as the basis for issuing the Perppu. This method allows researchers to comprehensively examine the constitutionality of the formation of the Perppu Cipta Kerja, including its implications for the Indonesian legal system and the principle of popular sovereignty which is the core of constitutional democracy.

The recommendation of this research is that the government and the DPR are expected to be more careful in using the Perppu instrument, by ensuring that all elements of compelling interests can be measured objectively, supported by concrete evidence, and communicated transparently to the public. There also needs to be an improvement in the legislative mechanism to increase public participation in the formation of regulations, so that the decision-making process reflects more inclusive democratic principles.

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NO 54/PUU- XXI/2023)

Tata cara pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. UU P3 menekankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, namun dalam praktiknya sering terjadi masalah formil maupun materiel. UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai kritik, terutama karena metode omnibus law yang dianggap melanggar prinsip tata kelola yang baik. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam dua tahun dengan melibatkan partisipasi publik. Namun, pemerintah dan DPR justru menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, langkah yang dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 91/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data utama berasal dari dokumen peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian prosedur pembentukan Perppu dengan prinsip konstitusionalitas. Penelitian ini juga membahas implikasi yuridis dan konstitusional dari Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023, termasuk *dissenting opinion* dari empat hakim konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2022 tidak sepenuhnya memenuhi kriteria darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Penetapannya menjadi undang-undang juga tidak mencerminkan partisipasi publik yang bermakna, sehingga berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat.

Kata Kunci: Perppu, Cipta Kerja, Demokrasi Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Kepentingan Memaksa.

ABSTRACT

CONSTITUTIONALITY OF THE FORMATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2022 ON JOB CREATION (STUDY OF MK DECISION NO. 54/PUU-XXI/2023)

The procedure for drafting laws in Indonesia is governed by Article 22A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU P3), which was most recently amended by Law Number 13 of 2022. UU P3 emphasizes the principles of legal certainty, justice, and utility, but in practice, formal and material issues frequently arise. The Job Creation Law (UU Ciptaker) faced criticism, particularly for using the omnibus law method, which was deemed to violate good governance principles. Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional, requiring revisions within two years with meaningful public participation. However, instead of making the required amendments, the government and the House of Representatives (DPR) issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022, which was later enacted as Law No. 6 of 2023, a move considered contradictory to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. This study adopts a normative juridical method with a statutory and case approach. The primary data comprises regulations, Constitutional Court rulings, and related scholarly literature. The analysis is conducted qualitatively to evaluate the procedural compliance of Perppu No. 2 of 2022 with constitutional principles. The study also examines the legal and constitutional implications of Constitutional Court Decision No. 54/PUU-XXI/2023, including dissenting opinions from four constitutional judges. The findings reveal that the issuance of Perppu No. 2 of 2022 does not fully meet the emergency criteria stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009. Its enactment as law also lacked meaningful public participation, raising concerns about potential violations of transparency, accountability, and public rights principles.

Keywords: Perppu, Job Creation, Constitutional Democracy, Constitutional Court, Compelling Circumstances.

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4. Originalitas Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	13
1.5.1 Demokrasi Konstitusional	13
1.5.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	15
1.5.3 Kegentingan Yang Memaksa	17
1.6. Metode Penelitian	18
1.6.1 Metode Penelitian	18
1.6.2 Tipe Penelitian	19
1.6.3. Pendekatan	19
1.6.4 Sumber Bahan Hukum	21

1.6.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	22
1.6.6 Analisis Bahan Hukum	22
1.7 Sistematika Penulisan	23
BAB II ALASAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	24
2.1 Landasan Konstitusional Dan Kriteria Kegentingan Yang Memaksa	24
2.2 Analisis Kegentingan dalam Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022	26
2.3 Perdebatan Akademis dan Implikasi Demokrasi	32
BAB III PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH DPR SESUAI DENGAN PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL	37
3.1 Aspek Konstitusionalitas dalam Penerbitan Perppu Cipta Kerja	37
3.2 Proses Legislasi dan Persetujuan DPR atas Perppu Cipta Kerja	40
3.3 Implikasi Penerapan Perppu Cipta Kerja terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	43
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Simpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50